



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1209, 2016

KEMENKUMHAM. Jabatan Notaris. Formasi.  
Penentuan Kategori Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh Notaris, dan dalam rangka memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia, perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
- b. bahwa Formasi Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat

terhadap layanan jasa hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota.
3. Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi Jabatan Notaris.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Menteri menentukan Formasi Jabatan Notaris setelah mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Notaris.
- (2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

- (1) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan Formasi Jabatan Notaris paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Formasi Jabatan Notaris.

## Pasal 4

Informasi Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dimuat dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 5

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
  - a. kegiatan dunia usaha;
  - b. jumlah penduduk; dan/atau
  - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Penentuan kegiatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menggunakan data dari perbankan.
- (3) Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan.
- (4) Penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan menggunakan database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 6

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan Notaris.

Pasal 7

- (1) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman untuk menentukan Kategori Daerah.
- (2) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kategori Daerah A meliputi:
    1. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
    2. Kota Administrasi Jakarta Barat;
    3. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
    4. Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
    5. Kota Administrasi Jakarta Timur.
  - b. Kategori Daerah B meliputi:
    1. Kota Bandung;
    2. Kota Surabaya;
    3. Kota Semarang;
    4. Kota Medan;
    5. Kota Makassar;
    6. Kota Tangerang Selatan;
    7. Kota Bekasi;
    8. Kota Yogyakarta;
    9. Kota Depok;
    10. Kabupaten Bogor;
    11. Kabupaten Tangerang; dan
    12. Kabupaten Sleman.
  - c. Kategori Daerah C meliputi:
    1. Kabupaten Bekasi;
    2. Kota Bogor;
    3. Kota Tangerang;
    4. Kabupaten Sidoarjo;
    5. Kabupaten Bantul;

6. Kota Surakarta;
  7. Kabupaten Deli Serdang;
  8. Kabupaten Gowa;
  9. Kota Batam;
  10. Kota Pekanbaru;
  11. Kota Denpasar;
  12. Kabupaten Badung; dan
  13. Kabupaten Gianyar.
- d. Kategori Daerah D meliputi kabupaten/kota selain Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah C.

#### Pasal 8

- (1) Kategori Daerah A diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah B.
- (2) Kategori Daerah B untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah A dan Kategori Daerah C.
- (3) Kategori Daerah C untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah D.
- (4) Kategori Daerah D untuk perpindahan wilayah jabatan Notaris dari seluruh Kategori Daerah dan pengangkatan Notaris.

#### Pasal 9

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memindahkan Notaris di luar ketentuan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan permohonan dari Notaris.

#### Pasal 10

Terhadap permohonan Pengangkatan Notaris dan Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris yang sudah masuk secara elektronik dalam daftar tunggu dan cadangan daftar tunggu sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan formasi untuk diangkat atau dipindahkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1637), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2016  
TENTANG  
FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN  
KATEGORI DAERAH

Matrik Formasi Jabatan Notaris Tahun 2016 - 2019

No	Kabupaten/Kota	FORMASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN DATA TAHUN 2015	NOTARIS YANG TELAH DIANGKAT SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 JUNI 2016	FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2016	FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2017	FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2018	FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2019
I	PROVINSI ACEH						
1	Kabupaten Aceh Barat	34	7	27	4	4	5
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	24	3	21	3	3	3
3	Kabupaten Aceh Besar	32	29	3	4	4	4
4	Kabupaten Aceh Jaya	12	2	10	2	2	2
5	Kabupaten Aceh Selatan	32	4	28	4	4	4
6	Kabupaten Aceh Singkil	12	3	9	2	2	2
7	Kabupaten Aceh Tamiang	32	6	26	4	4	4
8	Kabupaten Aceh Tengah	32	2	30	4	4	4
9	Kabupaten Aceh Tenggara	22	6	16	3	3	3
10	Kabupaten Aceh Timur	34	7	27	4	4	5

11	Kabupaten Aceh Utara	28	6	22	3	4	4
12	Kabupaten Bener Meriah	18	3	15	2	2	3
13	Kabupaten Bireuen	40	8	30	4	5	5
14	Kabupaten Gayo Lues	12	2	10	2	2	2
15	Kabupaten Nagan Raya	18	3	15	2	2	3
16	Kabupaten Pidie	54	4	30	6	6	7
17	Kabupaten Pidie Jaya	6	3	3	2	2	2
18	Kabupaten Simeulue	8	1	7	2	2	2
19	Kota Banda Aceh	210	32	30	21	24	26
20	Kota Langsa	44	8	30	5	5	6
21	Kota Lhokseumawe	104	17	30	11	12	13
22	Kota Sabang	10	1	9	2	2	2
23	Kota Subulussalam	6	3	3	2	2	2
II	PROVINSI SUMATERA UTARA						
1	Kabupaten Asahan	60	21	30	6	7	8
2	Kabupaten Batu Bara	14	13	2	2	2	2
3	Kabupaten Dairi	32	5	27	4	4	4
4	Kabupaten Deli Serdang	148	190	2	15	17	18
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	14	5	9	2	2	2
6	Kabupaten Karo	76	16	30	8	9	10
7	Kabupaten Labuhanbatu	144	40	30	15	16	18
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	13	3	10	2	2	2

9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	15	0	15	2	2	2
10	Kabupaten Langkat	64	70	2	7	8	8
11	Kabupaten Mandailing Natal	34	8	26	4	4	5
12	Kabupaten Nias	14	3	11	2	2	2
13	Kabupaten Nias Barat	4	0	4	2	2	2
14	Kabupaten Nias Selatan	14	1	13	2	2	2
15	Kabupaten Nias Utara	6	0	6	2	2	2
16	Kabupaten Padang Lawas	10	5	5	2	2	2
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	11	8	3	2	2	2
18	Kabupaten Pakpak Bharat	2	0	2	2	2	2
19	Kabupaten Samosir	12	2	10	2	2	2
20	Kabupaten Serdang Bedagai	28	54	2	3	4	4
21	Kabupaten Simalungun	54	29	25	6	6	7
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	36	5	30	4	4	5
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	16	2	14	2	2	2
24	Kabupaten Tapanuli Utara	36	4	30	4	4	5

25	Kabupaten Toba Samosir	44	5	30	5	5	6
26	Kota Binjai	70	27	30	7	8	9
27	Kota Gunungsitoli	7	1	6	2	2	2
28	Kota Medan	1006	253	30	30	30	30
29	Kota Padang Sidempuan	82	10	30	9	10	11
30	Kota Pematang Siantar	172	33	30	18	19	21
31	Kota Sibolga	72	6	30	8	8	9
32	Kota Tanjung Balai	52	9	30	6	6	7
33	Kota Tebing Tinggi	70	16	30	7	8	9
III	PROVINSI SUMATERA BARAT						
1	Kabupaten Agam	44	25	19	5	5	6
2	Kabupaten Dharmasraya	34	17	17	4	4	5
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	12	0	12	2	2	2
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	50	14	30	5	6	7
5	Kabupaten Padang Pariaman	40	21	19	4	5	5
6	Kabupaten Pasaman	42	5	30	5	5	6

7	Kabupaten Pasaman Barat	26	16	10	3	3	4
8	Kabupaten Pesisir Selatan	56	11	30	6	7	7
9	Kabupaten Sijunjung	46	6	30	5	6	6
10	Kabupaten Solok	15	17	2	2	2	2
11	Kabupaten Solok Selatan	28	4	24	3	4	4
12	Kabupaten Tanah Datar	60	9	30	6	7	8
13	Kota Bukittinggi	94	17	30	10	11	12
14	Kota Padang	320	90	30	30	30	30
15	Kota Padang Panjang	22	6	16	3	3	3
16	Kota Pariaman	14	8	6	2	2	2
17	Kota Payakumbuh	50	12	30	5	6	7
18	Kota Sawahlunto	16	3	13	2	2	2
19	Kota Solok	54	5	30	6	6	7
IV	PROVINSI RIAU						
1	Kabupaten Bengkalis	84	37	30	9	10	11
2	Kabupaten Indragiri Hilir	44	7	30	5	5	6
3	Kabupaten Indragiri Hulu	64	15	30	7	8	8
4	Kabupaten Kampar	80	70	10	8	9	10

5	Kabupaten Kepulauan Meranti	8	6	2	2	2	2
6	Kabupaten Kuantan Singingi	40	13	27	4	5	5
7	Kabupaten Pelalawan	48	23	25	5	6	6
8	Kabupaten Rokan Hilir	54	21	30	6	6	7
9	Kabupaten Rokan Hulu	58	21	30	6	7	8
10	Kabupaten Siak	58	22	30	6	7	8
11	Kota Dumai	82	21	30	9	10	11
12	Kota Pekanbaru	528	157	30	30	30	30
V	PROVINSI JAMBI						
1	Kabupaten Batanghari	34	2	30	4	4	5
2	Kabupaten Bungo	52	25	27	6	6	7
3	Kabupaten Kerinci	28	6	22	3	4	4
4	Kabupaten Merangin	46	8	30	5	6	6
5	Kabupaten Muaro Jambi	52	21	30	6	6	7
6	Kabupaten Sarolangun	42	7	30	5	5	6
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	40	6	30	4	5	5
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	16	2	14	2	2	2
9	Kabupaten Tebo	30	6	24	3	4	4
10	Kota Jambi	338	39	30	30	30	30
11	Kota Sungai Penuh	8	3	5	2	2	2
VI	PROVINSI SUMATERA SELATAN						
1	Kabupaten Banyuasin	32	33	2	4	4	4
2	Kabupaten Empat Lawang	13	1	12	2	2	2
3	Kabupaten Lahat	44	5	30	5	5	6
4	Kabupaten Muara Enim	58	14	30	6	7	8

5	Kabupaten Musi Banyuasin	64	9	30	7	8	8
6	Kabupaten Musi Rawas	42	4	30	5	5	6
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	5	0	5	2	2	2
8	Kabupaten Ogan Ilir	22	9	13	3	3	3
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	48	12	30	5	6	6
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu	86	9	30	9	10	11
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	16	2	14	2	2	2
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	25	5	20	3	3	4
13	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	5	1	4	2	2	2
14	Kota Lubuk Linggau	56	7	30	6	7	7
15	Kota Pagar Alam	26	1	25	3	3	4
16	Kota Palembang	560	179	30	30	30	30
17	Kota Prabumulih	58	13	30	6	7	8
VII PROVINSI BENGKULU							
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	40	3	30	4	5	5
2	Kabupaten Bengkulu Tengah	4	0	4	2	2	2
3	Kabupaten Bengkulu Utara	54	3	30	6	6	7
4	Kabupaten Kaur	10	2	8	2	2	2

5	Kabupaten Kepahiang	14	1	13	2	2	2
6	Kabupaten Lebong	8	1	7	2	2	2
7	Kabupaten Muko Muko	30	4	26	3	4	4
8	Kabupaten Rejang Lebong	36	3	30	4	4	5
9	Kabupaten Seluma	14	4	10	2	2	2
10	Kota Bengkulu	166	19	30	17	19	21
VIII PROVINSI LAMPUNG							
1	Kabupaten Lampung Barat	22	3	19	3	3	3
2	Kabupaten Lampung Selatan	54	45	9	6	6	7
3	Kabupaten Lampung Tengah	78	18	30	8	9	10
4	Kabupaten Lampung Timur	52	11	30	6	6	7
5	Kabupaten Lampung Utara	50	7	30	5	6	7
6	Kabupaten Mesuji	13	2	11	2	2	2
7	Kabupaten Pesawaran	22	13	9	3	3	3
8	Kabupaten Pesisir Barat	5	0	5	2	2	2
9	Kabupaten Pringsewu	17	12	5	2	2	3
10	Kabupaten Tanggamus	38	10	28	4	5	5
11	Kabupaten Tulang Bawang	42	9	30	5	5	6
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	10	2	8	2	2	2
13	Kabupaten Way Kanan	22	3	19	3	3	3
14	Kota Bandar Lampung	380	122	30	30	30	30
15	Kota Metro	62	13	30	7	7	8
IX PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG							
1	Kabupaten Bangka	42	11	30	5	5	6
2	Kabupaten Bangka Barat	16	2	14	2	2	2
3	Kabupaten Bangka Selatan	14	2	12	2	2	2

4	Kabupaten Bangka Tengah	7	6	2	2	2	2
5	Kabupaten Belitung	40	5	30	4	5	5
6	Kabupaten Belitung Timur	8	2	6	2	2	2
7	Kota Pangkal Pinang	142	15	30	15	16	18
X	PROVINSI KEPULAUAN RIAU						
1	Kabupaten Bintan	18	17	2	2	2	3
2	Kabupaten Karimun	42	10	30	5	5	6
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	2	1	2	2	2	2
4	Kabupaten Lingga	4	1	3	2	2	2
5	Kabupaten Natuna	18	3	15	2	2	3
6	Kota Batam	418	101	30	30	30	30
7	Kota Tanjung Pinang	148	24	30	15	17	18
XI	PROVINSI DKI JAKARTA						
1	Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	2	2	2	2	2	2
2	Kota Administrasi Jakarta Barat	1664	188	30	30	30	30
3	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1818	141	30	30	30	30
4	Kota Administrasi Jakarta Selatan	2016	292	30	30	30	30

5	Kota Administrasi Jakarta Timur	868	211	30	30	30	30
6	Kota Administrasi Jakarta Utara	1322	117	30	30	30	30
XII	PROVINSI JAWA BARAT						
1	Kabupaten Bandung	360	357	3	30	30	30
2	Kabupaten Bandung Barat	64	146	2	7	8	8
3	Kabupaten Bekasi	364	274	30	30	30	30
4	Kabupaten Bogor	296	496	2	30	30	30
5	Kabupaten Ciamis	120	22	30	12	14	15
6	Kabupaten Cianjur	160	129	30	16	18	20
7	Kabupaten Cirebon	162	98	30	17	18	20
8	Kabupaten Garut	154	30	30	16	17	19
9	Kabupaten Indramayu	144	36	30	15	16	18
10	Kabupaten Karawang	276	236	30	28	30	30
11	Kabupaten Kuningan	78	17	30	8	9	10
12	Kabupaten Majalengka	94	23	30	10	11	12
13	Kabupaten Pangandaran	5	1	4	2	2	2
14	Kabupaten Purwakarta	114	76	30	12	13	14
15	Kabupaten Subang	162	82	30	17	18	20
16	Kabupaten Sukabumi	146	110	30	15	17	18
17	Kabupaten Sumedang	106	90	16	11	12	13
18	Kabupaten Tasikmalaya	140	18	30	14	16	17
19	Kota Bandung	1280	256	30	30	30	30
20	Kota Banjar	34	8	26	4	4	5
21	Kota Bekasi	484	274	30	30	30	30
22	Kota Bogor	374	104	30	30	30	30
23	Kota Cimahi	110	59	30	11	13	14
24	Kota Cirebon	264	37	30	27	30	30
25	Kota Depok	308	240	30	30	30	30
26	Kota Sukabumi	150	26	30	15	17	19
27	Kota Tasikmalaya	200	31	30	20	22	25

XIII	PROVINSI JAWA TENGAH						
1	Kabupaten Banjarnegara	74	10	30	8	9	10
2	Kabupaten Banyumas	208	87	30	21	23	26
3	Kabupaten Batang	62	28	30	7	7	8
4	Kabupaten Blora	86	17	30	9	10	11
5	Kabupaten Boyolali	82	70	12	9	10	11
6	Kabupaten Brebes	112	44	30	12	13	14
7	Kabupaten Cilacap	168	45	30	17	19	21
8	Kabupaten Demak	62	96	2	7	7	8
9	Kabupaten Grobogan	88	30	30	9	10	11
10	Kabupaten Jepara	76	37	30	8	9	10
11	Kabupaten Karanganyar	98	69	29	10	11	12
12	Kabupaten Kebumen	114	22	30	12	13	14
13	Kabupaten Kendal	104	83	21	11	12	13
14	Kabupaten Klaten	142	75	30	15	16	18
15	Kabupaten Kudus	164	63	30	17	19	20
16	Kabupaten Magelang	116	73	30	12	13	15
17	Kabupaten Pati	134	33	30	14	15	17
18	Kabupaten Pekalongan	66	34	30	7	8	9
19	Kabupaten Pemalang	88	20	30	9	10	11
20	Kabupaten Purbalingga	74	20	30	8	9	10
21	Kabupaten Purworejo	78	22	30	8	9	10
22	Kabupaten Rembang	54	12	30	6	6	7
23	Kabupaten Semarang	192	115	30	20	22	24
24	Kabupaten Sragen	100	41	30	10	11	13
25	Kabupaten Sukoharjo	134	83	30	14	15	17
26	Kabupaten Tegal	108	64	30	11	12	14
27	Kabupaten Temanggung	76	22	30	8	9	10
28	Kabupaten Wonogiri	90	25	30	9	10	11
29	Kabupaten Wonosobo	60	11	30	6	7	8

30	Kota Magelang	112	14	30	12	13	14
31	Kota Pekalongan	118	22	30	12	13	15
32	Kota Salatiga	82	18	30	9	10	11
33	Kota Semarang	682	162	30	30	30	30
34	Kota Surakarta	502	87	30	30	30	30
35	Kota Tegal	184	24	30	19	21	23
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA						
1	Kabupaten Bantul	102	105	2	11	12	13
2	Kabupaten Gunung Kidul	56	36	20	6	7	7
3	Kabupaten Kulon Progo	48	50	2	5	6	6
4	Kabupaten Sleman	212	177	30	22	24	26
5	Kota Yogyakarta	428	85	30	30	30	30
XV	PROVINSI JAWA TIMUR						
1	Kabupaten Bangkalan	54	32	22	6	6	7
2	Kabupaten Banyuwangi	202	63	30	21	23	25
3	Kabupaten Blitar	82	20	30	9	10	11
4	Kabupaten Bojonegoro	112	26	30	12	13	14
5	Kabupaten Bondowoso	60	8	30	6	7	8
6	Kabupaten Gresik	168	138	30	17	19	21
7	Kabupaten Jember	292	70	30	30	30	30
8	Kabupaten Jombang	144	47	30	15	16	18
9	Kabupaten Kediri	178	48	30	18	20	22
10	Kabupaten Lamongan	102	60	30	11	12	13
11	Kabupaten Lumajang	76	9	30	8	9	10
12	Kabupaten Madiun	78	28	30	8	9	10
13	Kabupaten Magetan	68	15	30	7	8	9
14	Kabupaten Malang	210	178	30	21	24	26
15	Kabupaten Mojokerto	82	94	2	9	10	11
16	Kabupaten Nganjuk	86	17	30	9	10	11

17	Kabupaten Ngawi	74	12	30	8	9	10
18	Kabupaten Pacitan	44	7	30	5	5	6
19	Kabupaten Pamekasan	48	10	30	5	6	6
20	Kabupaten Pasuruan	114	110	4	12	13	14
21	Kabupaten Ponorogo	96	10	30	10	11	12
22	Kabupaten Probolinggo	68	22	30	7	8	9
23	Kabupaten Sampang	33	6	27	4	4	5
24	Kabupaten Sidoarjo	326	212	30	30	30	30
25	Kabupaten Situbondo	68	9	30	7	8	9
26	Kabupaten Sumenep	46	8	30	5	6	6
27	Kabupaten Trenggalek	48	10	30	5	6	6
28	Kabupaten Tuban	86	33	30	9	10	11
29	Kabupaten Tulungagung	132	24	30	14	15	17
30	Kota Batu	38	21	17	4	5	5
31	Kota Blitar	52	5	30	6	6	7
32	Kota Kediri	142	19	30	15	16	18
33	Kota Madiun	92	14	30	10	11	12
34	Kota Malang	428	96	30	30	30	30
35	Kota Mojokerto	80	13	30	8	9	10
36	Kota Pasuruan	52	19	30	6	6	7
37	Kota Probolinggo	50	16	30	5	6	7
38	Kota Surabaya	1702	285	30	30	30	30
XVI	PROVINSI BANTEN						
1	Kabupaten Lebak	56	43	13	6	7	7
2	Kabupaten Pandeglang	64	33	30	7	8	8
3	Kabupaten Serang	130	147	2	13	15	16
4	Kabupaten Tangerang	308	464	2	30	30	30
5	Kota Cilegon	130	39	30	13	15	16
6	Kota Serang	44	45	2	5	5	6
7	Kota Tangerang	610	161	30	30	30	30

8	Kota Tangerang Selatan	104	290	2	11	12	13
XVII	PROVINSI BALI						
1	Kabupaten Badung	218	130	30	22	24	27
2	Kabupaten Bangli	32	12	20	4	4	4
3	Kabupaten Buleleng	104	62	30	11	12	13
4	Kabupaten Gianyar	142	59	30	15	16	18
5	Kabupaten Jembrana	50	14	30	5	6	7
6	Kabupaten Karangasem	58	21	30	6	7	8
7	Kabupaten Klungkung	40	21	19	4	5	5
8	Kabupaten Tabanan	110	45	30	11	13	14
9	Kota Denpasar	572	124	30	30	30	30
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT						
1	Kabupaten Bima	40	4	30	4	5	5
2	Kabupaten Dompu	24	4	20	3	3	3
3	Kabupaten Lombok Barat	46	34	12	5	6	6
4	Kabupaten Lombok Tengah	48	21	27	5	6	6
5	Kabupaten Lombok Timur	68	13	30	7	8	9
6	Kabupaten Lombok Utara	9	13	2	2	2	2
7	Kabupaten Sumbawa	60	12	30	6	7	8
8	Kabupaten Sumbawa Barat	16	4	12	2	2	2

9	Kota Bima	22	9	13	3	3	3
10	Kota Mataram	262	39	30	27	29	30
XIX PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR							
1	Kabupaten Alor	20	1	19	2	3	3
2	Kabupaten Belu	42	4	30	5	5	6
3	Kabupaten Ende	36	3	30	4	4	5
4	Kabupaten Flores Timur	26	1	25	3	3	4
5	Kabupaten Kupang	46	14	30	5	6	6
6	Kabupaten Lembata	10	2	8	2	2	2
7	Kabupaten Manggarai	32	4	28	4	4	4
8	Kabupaten Manggarai Barat	12	6	6	2	2	2
9	Kabupaten Manggarai Timur	10	1	9	2	2	2
10	Kabupaten Nagekeo	8	1	7	2	2	2
11	Kabupaten Ngada	24	1	23	3	3	3
12	Kabupaten Rote Ndao	8	2	6	2	2	2

13	Kabupaten Sabu Raijua	3	0	3	2	2	2
14	Kabupaten Sikka	38	6	30	4	5	5
15	Kabupaten Sumba Barat	16	1	15	2	2	2
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	12	2	10	2	2	2
17	Kabupaten Sumba Tengah	6	0	6	2	2	2
18	Kabupaten Sumba Timur	28	3	25	3	4	4
19	Kabupaten Timor Tengah Selatan	38	2	30	4	5	5
20	Kabupaten Timor Tengah Utara	30	2	28	3	4	4
21	Kota Kupang	130	19	30	13	15	16
XX PROVINSI KALIMANTAN BARAT							
1	Kabupaten Bengkayang	24	4	20	3	3	3
2	Kabupaten Kapuas Hulu	42	2	30	5	5	6
3	Kabupaten Kayong Utara	8	2	6	2	2	2
4	Kabupaten Ketapang	62	7	30	7	7	8
5	Kabupaten Kubu Raya	30	43	2	3	4	4
6	Kabupaten Landak	16	2	14	2	2	2



7	Kabupaten Melawi	22	3	19	3	3	3
8	Kabupaten Mempawah	0	0	2	2	2	2
9	Kabupaten Pontianak	60	5	30	6	7	8
10	Kabupaten Sambas	54	4	30	6	6	7
11	Kabupaten Sanggau	68	7	30	7	8	9
12	Kabupaten Sekadau	14	2	12	2	2	2
13	Kabupaten Sintang	46	9	30	5	6	6
14	Kota Pontianak	342	49	30	30	30	30
15	Kota Singkawang	62	13	30	7	7	8
XXI	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH						
1	Kabupaten Barito Selatan	20	3	17	2	3	3
2	Kabupaten Barito Timur	14	4	10	2	2	2
3	Kabupaten Barito Utara	30	4	26	3	4	4
4	Kabupaten Gunung Mas	12	3	9	2	2	2
5	Kabupaten Kapuas	32	9	23	4	4	4
6	Kabupaten Katingan	12	2	10	2	2	2

7	Kabupaten Kotawaringin Barat	52	13	30	6	6	7
8	Kabupaten Kotawaringin Timur	56	18	30	6	7	7
9	Kabupaten Lamandau	10	2	8	2	2	2
10	Kabupaten Murung Raya	24	2	22	3	3	3
11	Kabupaten Pulang Pisau	10	2	8	2	2	2
12	Kabupaten Seruyan	10	2	8	2	2	2
13	Kabupaten Sukamara	10	2	8	1	2	2
14	Kota Palangkaraya	128	18	30	13	15	16
XXII	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN						
1	Kabupaten Balangan	16	2	14	2	2	2
2	Kabupaten Banjar	70	44	26	7	8	9
3	Kabupaten Barito Kuala	22	10	12	3	3	3
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	36	3	30	4	4	5
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	42	4	30	5	5	6
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	38	1	30	4	5	5
7	Kabupaten Kotabaru	56	7	30	6	7	7

8	Kabupaten Tabalong	52	5	30	6	6	7
9	Kabupaten Tanah Bumbu	54	5	30	6	6	7
10	Kabupaten Tanah Laut	38	7	30	4	5	5
11	Kabupaten Tapin	36	2	30	4	4	5
12	Kota Banjarbaru	56	23	30	6	7	7
13	Kota Banjarmasin	318	54	30	30	30	30
XXIII PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
1	Kabupaten Berau	44	8	30	5	5	6
2	Kabupaten Kutai Barat	30	2	28	3	4	4
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	72	37	30	8	8	9
4	Kabupaten Kutai Timur	40	9	30	4	5	5
5	Kabupaten Mahakam Ulu	5	0	5	2	2	2
6	Kabupaten Paser	46	7	30	5	6	6
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	26	9	17	3	3	4
8	Kota Balikpapan	356	57	30	30	30	30
9	Kota Bontang	64	13	30	7	8	8

10	Kota Samarinda	358	84	30	30	30	30
XXIV PROVINSI SULAWESI UTARA							
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	38	5	30	4	5	5
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	6	0	6	2	2	2
3	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	3	0	3	2	2	2
4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	3	1	2	2	2	2
5	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	3	0	3	2	2	2
6	Kabupaten Kepulauan Sangihe	36	1	30	4	4	5
7	Kabupaten Kepulauan Talaud	4	1	3	2	2	2
8	Kabupaten Minahasa	42	10	30	5	5	6
9	Kabupaten Minahasa Selatan	24	5	19	3	3	3
10	Kabupaten Minahasa Tenggara	14	1	13	2	2	2
11	Kabupaten Minahasa Utara	16	15	2	2	2	2
12	Kota Bitung	52	15	30	6	6	7
13	Kota Kotamobagu	14	6	8	2	2	2
14	Kota Manado	280	44	30	28	30	30

15	Kota Tomohon	22	11	11	3	3	3
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGAH						
1	Kabupaten Banggai	54	12	30	6	6	7
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	20	1	19	2	3	3
3	Kabupaten Banggai Laut	5	1	4	2	2	2
4	Kabupaten Buol	14	2	12	2	2	2
5	Kabupaten Donggala	24	1	23	3	3	3
6	Kabupaten Morowali	20	3	17	2	3	3
7	Kabupaten Morowali Utara	5	0	5	2	2	2
8	Kabupaten Parigi Moutong	30	5	25	3	4	4
9	Kabupaten Poso	24	3	21	3	3	3
10	Kabupaten Sigi	10	9	2	2	2	2
11	Kabupaten Tojo Una Una	12	2	10	2	2	2
12	Kabupaten Toli Toli	36	3	30	4	4	5
13	Kota Palu	184	34	30	19	21	23
XXVI	PROVINSI SULAWESI SELATAN						

1	Kabupaten Bantaeng	20	4	16	2	3	3
2	Kabupaten Barru	22	5	17	3	3	3
3	Kabupaten Bone	62	15	30	7	7	8
4	Kabupaten Bulukumba	38	6	30	4	5	5
5	Kabupaten Enrekang	24	2	22	3	3	3
6	Kabupaten Gowa	50	64	2	5	6	7
7	Kabupaten Jeneponto	22	2	20	3	3	3
8	Kabupaten Kepulauan Selayar	14	1	13	2	2	2
9	Kabupaten Luwu	28	6	22	3	4	4
10	Kabupaten Luwu Timur	36	4	30	4	4	5
11	Kabupaten Luwu Utara	30	2	28	3	4	4
12	Kabupaten Maros	38	38	2	4	5	5
13	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	32	12	20	4	4	4
14	Kabupaten Pinrang	34	11	23	4	4	5
15	Kabupaten Sidenreng Rappang	36	9	27	4	4	5
16	Kabupaten Sinjai	24	2	22	3	3	3

17	Kabupaten Soppeng	28	3	25	3	4	4
18	Kabupaten Takalar	24	18	6	3	3	3
19	Kabupaten Tana Toraja	36	3	30	4	4	5
20	Kabupaten Toraja Utara	9	1	8	2	2	2
21	Kabupaten Wajo	54	11	30	6	6	7
22	Kota Makassar	652	145	30	30	30	30
23	Kota Palopo	48	15	30	5	6	6
24	Kota Pare Pare	56	15	30	6	7	7
XXVII PROVINSI SULAWESI TENGGARA							
1	Kabupaten Bombana	16	2	14	2	2	2
2	Kabupaten Buton	14	1	13	2	2	2
3	Kabupaten Buton Selatan	5	0	5	2	2	2
4	Kabupaten Buton Tengah	5	0	5	2	2	2
5	Kabupaten Buton Utara	2	1	2	2	2	2
6	Kabupaten Kolaka	44	9	30	5	5	6

7	Kabupaten Kolaka Timur	5	1	4	2	2	2
8	Kabupaten Kolaka Utara	16	2	14	2	2	2
9	Kabupaten Konawe	20	3	17	2	3	3
10	Kabupaten Konawe Kepulauan	5	0	5	2	2	2
11	Kabupaten Konawe Selatan	14	7	7	2	2	2
12	Kabupaten Konawe Utara	3	1	2	2	2	2
13	Kabupaten Muna	26	3	23	3	3	4
14	Kabupaten Muna Barat	5	0	5	2	2	2
15	Kabupaten Wakatobi	4	1	3	2	2	2
16	Kota Bau Bau	36	8	28	4	4	5
17	Kota Kendari	176	27	30	18	20	22
XXVIII PROVINSI GORONTALO							
1	Kabupaten Boalemo	18	3	15	2	2	3
2	Kabupaten Bone Bolango	10	2	8	2	2	2
3	Kabupaten Gorontalo	52	5	30	6	6	7
4	Kabupaten Gorontalo Utara	5	1	4	2	2	2
5	Kabupaten Pohuwato	22	1	21	3	3	3
6	Kota Gorontalo	82	11	30	9	10	11
XXIX PROVINSI SULAWESI BARAT							

1	Kabupaten Majene	18	2	16	2	2	3
2	Kabupaten Mamasa	10	1	9	2	2	2
3	Kabupaten Mamuju	42	22	20	5	5	6
4	Kabupaten Mamuju Tengah	5	0	5	2	2	2
5	Kabupaten Mamuju Utara	22	4	18	3	3	3
6	Kabupaten Polewali Mandar	30	8	22	3	4	4
7	Kota Mamuju	62	0	30	7	7	8
XXX PROVINSI MALUKU							
1	Kabupaten Buru	14	3	11	2	2	2
2	Kabupaten Buru Selatan	5	0	5	2	2	2
3	Kabupaten Kepulauan Aru	6	2	4	2	2	2
4	Kabupaten Maluku Barat Daya	3	0	3	2	2	2
5	Kabupaten Maluku Tengah	32	3	29	4	4	4
6	Kabupaten Maluku Tenggara	22	1	21	3	3	3
7	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	20	1	19	2	3	3
8	Kabupaten Seram Bagian Barat	16	2	14	2	2	2
9	Kabupaten Seram Bagian Timur	10	0	10	2	2	2
10	Kota Ambon	150	17	30	15	17	19
11	Kota Tual	4	2	2	2	2	2
XXXI PROVINSI MALUKU UTARA							
1	Kabupaten Halmahera Barat	10	2	8	2	2	2
2	Kabupaten Halmahera Selatan	12	2	10	2	2	2
3	Kabupaten Halmahera Tengah	10	0	10	2	2	2
4	Kabupaten Halmahera Timur	4	0	4	2	2	2
5	Kabupaten Halmahera Utara	20	4	16	2	3	3
6	Kabupaten Kepulauan Sula	10	0	10	2	2	2
7	Kabupaten Pulau Morotai	2	0	2	2	2	2
8	Kabupaten Pulau Taliabu	5	0	5	2	2	2

9	Kota Sofifi	5	0	5	2	2	2
10	Kota Ternate	102	13	30	11	12	13
11	Kota Tidore Kepulauan	12	1	11	2	2	2
XXXII PROVINSI PAPUA							
1	Kabupaten Asmat	8	0	8	2	2	2
2	Kabupaten Biak Numfor	34	5	29	4	4	5
3	Kabupaten Boven Digoel	4	0	4	2	2	2
4	Kabupaten Deiyai	3	0	3	2	2	2
5	Kabupaten Dogiyai	4	0	4	2	2	2
6	Kabupaten Intan Jaya	4	0	4	2	2	2
7	Kabupaten Jayapura	52	11	30	6	6	7
8	Kabupaten Jayawijaya	22	3	19	3	3	3
9	Kabupaten Keerom	8	3	5	2	2	2
10	Kabupaten Kepulauan Yapen	22	1	21	3	3	3
11	Kabupaten Lanny Jaya	5	0	5	2	2	2
12	Kabupaten Mamberamo Raya	6	0	6	2	2	2
13	Kabupaten Mamberamo Tengah	2	0	2	2	2	2
14	Kabupaten Mappi	10	0	10	2	2	2
15	Kabupaten Merauke	44	4	30	5	5	6
16	Kabupaten Mimika	54	5	30	6	6	7
17	Kabupaten Nabire	36	5	30	4	4	5
18	Kabupaten Nduga	6	0	6	2	2	2
19	Kabupaten Paniai	6	0	6	2	2	2
20	Kabupaten Pegunungan Bintang	6	0	6	2	2	2
21	Kabupaten Puncak	6	0	6	2	2	2
22	Kabupaten Puncak Jaya	8	0	8	2	2	2
23	Kabupaten Sarmi	10	1	9	2	2	2
24	Kabupaten Supiori	4	0	4	2	2	2

25	Kabupaten Tolikara	9	0	9	2	2	2
26	Kabupaten Waropen	8	0	8	2	2	2
27	Kabupaten Yahukimo	13	0	13	2	2	2
28	Kabupaten Yalimo	4	0	4	2	2	2
29	Kota Jayapura	164	20	30	17	19	20
XXXIII PROVINSI PAPUA BARAT							
1	Kabupaten Fak Fak	24	2	22	3	3	3
2	Kabupaten Kaimana	8	1	7	2	2	2
3	Kabupaten Manokwari	62	5	30	7	7	8
4	Kabupaten Manokwari Selatan	5	0	5	2	2	2
5	Kabupaten Maybrat	2	0	2	2	2	2
6	Kabupaten Pegunungan Arfak	5	0	5	2	2	2
7	Kabupaten Raja Ampat	8	0	8	2	2	2
8	Kabupaten Sorong	34	7	27	4	4	5
9	Kabupaten Sorong Selatan	10	0	10	2	2	2
10	Kabupaten Tambrauw	1	0	2	2	2	2
11	Kabupaten Teluk Bintuni	20	2	18	2	3	3
12	Kabupaten Teluk Wondama	2	0	2	2	2	2
13	Kota Manokwari	5	0	5	2	2	2
14	Kota Sorong	66	10	30	7	8	9
XXXIV PROVINSI KALIMANTAN UTARA							
1	Kabupaten Bulungan	26	9	17	3	3	4
2	Kabupaten Malinau	14	2	12	2	2	2
3	Kabupaten Nunukan	30	2	28	3	4	4
4	Kabupaten Tana Tidung	8	1	7	2	2	2

5	Kota Tanjung Selor	5	0	5	2	2	2
6	Kota Tarakan	70	14	30	7	8	9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY